



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SULISTIAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO UMUM DAN AKADEMIK**
3. NHK : **640503**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 330.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPED MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 820.990.656**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.378.890.656

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.378.890.656

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.